

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO:12/DSN-  
MUI/IV/2000 TERHADAP *TAKE OVER* PEMBIAYAAN RUMAH  
SYARIAH iB MMQ DI BANK MAYBANK SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Lilies Permatasari**

**NIM C02215033**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilies Permatasari  
NIM : C02215033  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:  
12/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap *Take Over*  
Pembiayaan Rumah Syariah iB Mmq di Bank Maybank  
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Lilies Permatasari  
NIM. C02215033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilies Permatasari NIM. C02215033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 17 Oktober 2019

Pembimbing,



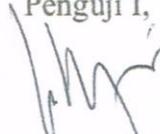
Dra. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196806271992032001

## PENGESAHAN

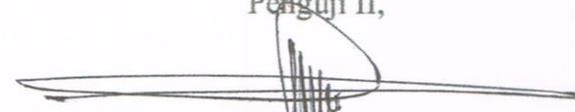
Skripsi yang ditulis oleh Lilies Permatasari NIM. C02215033 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

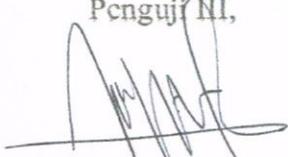
Penguji I,

  
Dra. Hj. Nurhayati, M. Ag  
NIP. 196806271992032001

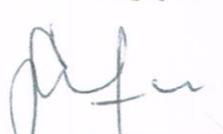
Penguji II,

  
Dr. Sanum, M. Fil  
NIP. 197601212007101001

Penguji III,

  
Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

  
Novi Sopwan, M. Si.  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 27 November 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Masruhan, M. Ag  
95904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lilies Permatasari  
NIM : C02215033  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : [liliespermatasari@gmail.com](mailto:liliespermatasari@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO:12/DSN-MUI/IV/2000  
TERHADAP TAKE OVER PEMBIAYAAN RUMAH SYARIAH IB MMQ DI BANK  
MAYBANK SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juli 2019

Penulis

  
(Lilies Permatasari)



































pembiayaan *Take Over* pada Bank Muamalat cabang Salatiga dengan menggunakan akad *al-qardh* dan *musyārah mutanāqishah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum. Respon positif dari masyarakat yang telah berfikir bahwa jasa keuangan syariah telah membawa mereka pada suatu kebutuhan untuk mengalihkan dana yang selama ini mereka simpan di lembaga keuangan konvensional lalu ke lembaga keuangan syariah. Bank Muamalat sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang paling senior di Indonesia merespon hal tersebut dengan menyediakan produk pembiayaan KPR *take over* syariah bagi nasabah yang telah terlanjur mengajukan pembiayaan KPR-nya di bank konvensional dan ingin memindahkan pembiayaan KPR-nya di Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan yang menggunakan proses *take over* ini dimana sisa tanggungan KPR diambil alih oleh Bank Muamalat, syaratnya juga tidak begitu rumit hanya saja prosesnya agak begitu lama.<sup>22</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pada objek penelitian mengenai pembiayaan KPR *Take Over*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan akad yang digunakan serta pisau analisis yang dipakai. Penulis tidak hanya memakai hukum Islam tetapi juga menggunakan fatwa DSN-MUI NO:12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hiwālah* sebagai pisau analisis yang dipakai dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Elsi Aprilia, "Analisis Pembiayaan KPR Take Over Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Salatiga Periode 2013-2015" (Skripsi—IAIN Salatiga, Salatiga, 2016).

**Kedua,** Skripsi yang berjudul “Mekanisme *Take Over* Pada Pembiayaan KPR iB Dengan Akad IMBT Di BRI Syariah KCP Purbalingga”. Oleh Isna Latifatul Zahro pada tahun 2018 (IAIN Purwokerto). Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa meneliti tentang mekanisme *take over* dalam pembiayaan KPR yang menggunakan akad IMBT (*Ijarah Muntahiyyah Bittamlik*). Mekanisme *take over* KPR iB tersebut dengan menggunakan akad IMBT di BRI Syariah KCP Purbalingga yaitu pengalihan hutang KPR yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari bank konvensional atau bank syariah lain yang bertujuan untuk menutup hutang di bank semula dan berpindah pembiayaan ke bank BRI Syariah KCP Purbalingga dengan melalui beberapa tahapan yang sudah ditentukan oleh pihak bank BRI Syariah KCP Purbalingga.<sup>23</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pada objek penelitian mengenai mekanisme *take over* pada pembiayaan KPR iB dengan akad IMBT. Sedangkan pada perbedaannya terletak pada pembahasan akad yang digunakan untuk menganalisis *take over* KPR iB.

**Ketiga,** Skripsi yang berjudul “*Implementasi Rescheduling, Resconditioning, dan Restructuring* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Mas Mansyur Surabaya”. Oleh Nur Awali

---

<sup>23</sup> Isna Latifah Zahroh, “Mekanisme Take Over Pada Pembiayaan KPRiB Dengan Akad IMBT Di BRI Syariah KCP Purbalingga”(Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018).





- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi praktisi perbankan syariah untuk melaksanakan praktik *take over* untuk pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ.

## G. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menimbulkan kesalahan fahaman pengertian terhadap judul penelitian “analisis hukum Islam dan dan fatwa DSN MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000 terhadap *take over* pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ di Bank Maybank Surabaya” , maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai pada judul penelitian diantaranya:

1. Hukum Islam merupakan berbagai pendapat hukum yang tertera dalam berbagai macam kitab dan buku-buku fiqih yang di gunakan sebagai alat untuk menganalisa berbagai hal yang penulis sebutkan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan *Hiwālah*.
2. Fatwa DSN MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Hiwālah* dan Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai *Musyārahah Mutanāqīshah*.
3. *Take Over* Pembiayaan Rumah Syariah iB adalah bentuk jasa pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah (pembiayaan) yang telah berjalan di bank konvensional menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah atas permintaan nasabah.











Fatwa DSN MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap *Take Over* Pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ Di Bank Maybank Surabaya”, peneliti menetapkan sistematika pembahasan dalam tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian bermaterai, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar table.

Dalam Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori. “Dasar Hukum *Ḥiwālah*, *Take Over* Serta Fatwa DSN-MUI Terhadap Pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ di Bank Maybank Surabaya”. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian akad *ḥiwālah*, dasar hukum *ḥiwālah*, rukun dan syarat *ḥiwālah*, macam-macam *ḥiwālah*, produk-produk *ḥiwālah*, berakhirnya akad *ḥiwālah*, pengertian akad *musyārahah mutanaqīshah*, dasar hukum *musyārahah mutanaqīshah*, rukun dan syarat *musyārahah mutanaqīshah*, *ḥiwālah* menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI, pengertian *take over*, pengertian KPR.

Bab Ketiga adalah laporan objek. “Pengolahan Data *Take Over* Dalam Akad MMQ Terhadap Pembiayaan Rumah Syariah iB di Bank

Maybank Surabaya”. Merupakan gambaran umum mengenai Bank Maybank Kantor Pusat KPR Jl. Pemuda Surabaya. Dalam bab ini diuraikan tentang profil dan sejarah objek penelitian, visi misi organisasi, struktur organisasi, produk-produk pembiayaan yang ada pada Maybank Kantor Pusat KPR, serta menguraikan pelaksanaan mekanisme tentang pembiayaan rumah syariah iB MMQ di Bank Maybank Jl. Pemuda Surabaya.

Bab Keempat adalah analisis data. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap *Take Over* Mengenai Pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ di Bank Maybank Surabaya”. Dalam bab ini membahas serta menganalisa meliputi Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000 terhadap *Take Over* Pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ Di Bank Maybank dan di perbandingkan memakai akad Musyarakah Mutanaqisah yang di terapkan oleh sistem dalam Bank Maybank.

Bab Kelima Penutup merupakan bab terakhir. Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan melalui analisis data untuk mengetahui kesesuaian akad pembiayaan *Take Over* KPR Pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ di Bank Maybank dengan Fatwa DSN-MUI. Kemudian ditutup dengan daftar pustaka.





























(perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

b. Objek perikatan (*mahall al-‘aqd*)

*Mahall al-‘aqd* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat yang harus dipenuhi dalam mahall al-‘aqd adalah pertama, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Kedua, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. *Ketiga*, objek akad harus jelas dan dikenali, benda (barang atau jasa) yang menjadi objek perikatan harus jelas dan diketahui oleh „*aqid*, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. *Keempat*, objek dapat diserahterimakan, artinya objek dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada dalam kekuasaan



1) *Jala' al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akadyang dikehendaki.

2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

3) *Jazm al-iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkankehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:

a) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentukperkataan secara jelas.

b) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang digunakasebagai alat bukti tertulis terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.

c) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orangorang normal , orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara maka akad dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang







Pengalihan utang yang dimaksud disini adalah pengalihan non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

Dalam proses *take over* ini, banyak bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (dalam hal ini rumah) menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi utang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut akan mengangsur perbulannya dengan nominal yang sudah sesuai perjanjian akad diawal dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak bank syariah.

## 2. Tujuan Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat yaitu *take over*. Disini bank berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksi hutangnya yang telah berjalan beralih ke transaksi hutang yang sesuai syariah. *Take over* ini bertujuan untuk membantu mengalihkan transaksi non syariah menjadi transaksi sesuai syariah.

## 3. Sebab terjadinya *Take Over*

*Take Over* (pengambil alihan) kredit pemilikan rumah (KPR) nasabah disuatu bank dapat terjadi karena hal-hal berikut:



























Syariah berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Bank. Kegiatan usaha Bank Syariah yang meliputi :

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya dengan prinsip syariah;
- 2) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudhārahah*, akad *salam*, akad *murabahāh*, akad *musyārakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hiwālah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risik SENDIRI surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain, seperti akad *musyārakah*, *mudhārahah*, *murabahāh*, *kafālah*, atau *hiwālah*;
- 5) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 6) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 7) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- 8) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;























KPR, Kredit Apartement, Kredit Ruko. Pelayanan pengalihan hutang (*take over*) ini, nasabah dapat melakukan pada produk pembiayaan juga digunakan *take over* untuk pembiayaan kendaraan.

Dalam pengajuan *take over* di Bank Maybank Syariah terdapat dokumen syarat-syarat dan jaminan pengajuan KPR iB MMQ.<sup>88</sup> Beberapa persyaratan umum seperti, warganegara indonesia cakap hukum, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun (untuk karyawan) dan 65 tahun (untuk pengusaha / profesional) saat kredit berakhir, memiliki penghasilan rutin, lama kerja atau usaha minimal 2 tahun (untuk karyawan) atau 3 tahun (untuk pengusaha / profesional), lokasi tempat tinggal, tempat bekerja dan obyek jaminan harus berada di wilayah operasional Maybank.

Tabel 3.5

## 1. Syarat KPR Maybank Syariah (Dokumen Pengaju KPR)

Dokumen	Karyawan	Pengusaha	Profesional
Fotokopi KTP & Kartu Keluarga (suami + istri, jika ada)	YA	YA	YA
Fotokopi Akta Nikah/Cerai/ Kematian/Perjanjian Pranikah (pilih 1 jika ada)	YA	YA	YA
Fotokopi NPWP Pribadi/ Perusahaan/SPT Pribadi (pilih 1)	YA	YA	YA
Fotokopi rekening tabungan/ giro minimal 3 bulan terakhir	YA	YA	YA
Asli Surat Keterangan Kerja & Slip Gaji	YA	-	-
Fotokopi Surat Ijin Praktek	-	-	YA
Fotokopi Akta Pendirian & Perubahannya, SIUP, TDP, NPWP	-	YA	-

<sup>88</sup>Bank Maybank Syariah “Dokumen Syarat dan Jaminan Pengajuan KPR”[https://www.sikatabis.com/kpr/bank/maybank\\_syariah](https://www.sikatabis.com/kpr/bank/maybank_syariah)





rumah dengan alasan diterapkannya di bank Maybank yaitu lebih meringankan dan membantu proses nasabah untuk *take over* pembiayaan rumah syariah iB MMQ dari bank konvensional ke bank Maybank Syariah.

Jika ada nasabah yang ingin melakukan *take over* KPR, dari pihak bank Maybank ini selalu menawarkan 2 pilihan mengenai *take over*, yaitu :

1. Jika memakai *take over* murni : sudah sesuai dengan sisa pokok bank di awal. Yaitu hanya memindahkan sisa hutang dari bank konvensional ke bank syariah dan hanya mencari angsuran yang lebih ringan.
2. Jika memakai *take over* top up : ada tambahan dari bank syariah. Maybank ini memberikan tambahan. Dari bank ini memberikan tambahan nominal untuk kebutuhannya si nasabah. Dasar penambahannya itu dari nilai asetnya (nilai jaminannya) dari bank konvensional posisinya. Misalkan dahulu nilainya 600.000.000, seiring berjalannya waktu yang berlangsung 5 tahun menjadi 1.000.000.000 otomatis.

Di bank Maybank ini selalu menawarkan langsung ke nasabah untuk pilihan level yang *top up*. Jadi keuntungan yang didapatkan dari bank ini otomatis lebih tinggi.

Seperti halnya yang akan dijelaskan oleh penulis berdasarkan kasus yang ada di bank Maybank Syariah tentang *take over* pembiayaan rumah syariah iB MMQ yang dilakukan oleh seorang nasabah:

1. Seorang nasabah yang bernama ibu Virda mengajukan pembiayaan rumah di bank konvensional dengan pembiayaan KPR, tetapi sebelumnya ibu Virda harus mengetahui dahulu berapa sisa pokok pinjaman KPR di bank konvensional dan sisa pinjamannya itu yang harus dilunasi oleh bank Syariah;
2. Berselang beberapa tahun kemudian ibu Virda merasa tidak mampu dengan angsuran pembiayaan KPR di bank konvensional karena ternyata setiap tahun bunganya selalu naik;
3. Setelah itu lalu ibu Virda mengajukan pembiayaan KPR di bank konvensional total pembiayaan sejumlah 1.050.000.000 beserta bunganya yang diangsur selama 15 tahun. Dengan angsurannya perbulan 5.833.000 dan sudah berjalan selama 10 tahun dengan total pembiayaan 700.000.000. Selama 10 tahun nasabah masih bisa membayar;
4. Akan tetapi ditahun ke 11 ibu Virda mengalami kendala dalam membayar angsuran dikarenakan bunga di bank konvensional pertahun semakin meningkat, maka dari itu;
5. Ibu Virda melakukan *take over* rumah syariah iB MMQ di bank Maybank syariah dengan menggunakan akad *musyārakah mutanaqīshah* dengan cara mengalihkan sisa nasabah meminta



merasa keberatan dengan angsuran perbulannya. Bank Maybank syariah menyediakan pembiayaan rumah syariah iBMMQ hal ini guna untuk membantu nasabah untuk meringankan biaya angsuran dari pihak bank pertama.

Dengan adanya menggunakan akad *musyarākah mutanāqisah* perjanjian diawal akad lebih meringankan sehingga menarik minat calon nasabah yang berkeinginan untuk memilih *take over* KPR di bank Maybank Syariah. Akan tetapi pada praktik di lapangannya tidak sesuai harapan dengan akad yang telah disetujui. Meskipun seperti itu tetap banyak yang memilih *take over* rumah syariah iB MMQ di bank Maybank Syariah.



syariah, yang nantinya pihak nasabah akan mengangsur ke pihak bank syariah dengan ketentuan yang telah disepakati baik oleh bank maupun oleh nasabah.

**B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No:12/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap *Take Over* Pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ di Bank Maybank Surabaya**

Take over yang terjadi pada penelitian ini yaitu pengalihan hutang dari bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya ke bank Maybank Surabaya, yang mana nasabah mempunyai hutang ke bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya kemudian dialihkan ke bank Maybank Surabaya dengan cara pengalihan hutang pembiayaan rumah syariah iB memakai akad MMQ kepada nasabah, sehingga nasabah bisa melunasi hutangnya kepada bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya. Setelah nasabah melunasi hutang yang ada di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya maka nasabah pun terbebas dan tidak mempunyai tanggungan lagi di bank konvensional pemberi fasilitas pinjaman sebelumnya, akan tetapi nasabah mempunyai tanggungan untuk melunasi pengalihan hutangnya yang telah dikeluarkan oleh bank Maybank Surabaya.

Jika menurut hukum Islam pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk memberikan pinjaman hutang atau membayar hutang dari kepada pihak ketiga, karena kepada pihak ketiga akan mengangsur hutangnya kepada pihak kedua dan



mitranya memiliki hak dan kewajiban yaitu memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat awal akad. Dan memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.

Mekanisme akad *Musyārahah Mutanaqīshah* pada pembiayaan Rumah Syariah iB MMQ yang diterapkan oleh Bank Maybank Surabaya dijalankan memakai akad *musyārahah mutanaqīshah* tujuannya untuk lebih meringankan beban nasabah yang sebelumnya telah mengalihkan hutangnya dari bank konvensional ke bank syariah yaitu bank Maybank. Dan dikatakan itu adalah alasannya Maybank lebih memilih memakai akad *musyārahah mutanaqīshah* dibandingkan dengan akad yang lainnya. Jika alasan yang diterapkan seperti itu, mengapa ada tambahan setelah dibantu oleh Maybank ini yang awalnya membantu dengan melunasi semua sisa hutang si nasabah di bank konvensional, dan nantinya nasabah ini mengangsur kembali kepada pihak Maybank yang diarahkan langsung pada pilihan *take over top up* yang angsurannya tinggi. Jadi pihak bank Maybank akan mendapatkan keuntungan lebih yaitu dari tambahan angsuran dan mendapatkan nasabah baru. Hal ini tidak sesuai dengan akad yang diterapkannya. Jika kejadiannya seperti itu bisa merujuk pada pemakaian akad *Ḥiwālah* atau bisa memakai akad Pengalihan Hutang yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI jika ingin pengalihan hutang (*take over*).

Dan jika memakai akad *Ḥiwālah* yang sudah jelas didalam Fatwa DSN MUI jika ingin *take over*, karena artiannya itu adalah pengalihan

hutang. Jika ada nasabah yang awalnya ingin KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ke bank konvensional, lalu waktu demi waktu nasabah merasa keberatan untuk membayar cicilan kepada pihak bank konvensional karena bunganya semakin melambung tinggi, akhirnya nasabah *mentake over* kan KPR ini ke pihak bank syariah untuk membayarkan sisa kreditnya kepada pihak bank konvensional. Karena bank syariah ini sebagai pihak ketiga memiliki kewajiban untuk membantu melunasi sisa cicilan hutang dari pihak bank konvensional dengan ketentuan yang ada. Setelah semua urusan telah selesai, nantinya nasabah akan menyicil kepada pihak bank syariah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Yaitu menyicil dalam artian sesuai dengan jumlah yang telah dibantu oleh pihak bank syariah untuk melunasi hutang pada pihak bank konven. Dan didalamnya tidak ada bunga lebih akan tetapi margin namanya untuk bank syariah hanya saja sebagai timbal baliknya digantikan dengan modal semacam pembelian bersama dan sama-sama mendapatkan porsi yang pas. Dalam hal seperti ini, jika memakai akad *hiwālah* pihak bank syariah sudah mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi yaitu mendapatkan nasabah baru.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa setiap produk bank syariah, termasuk produk pelayanan jasa perbankan syariah tidak terlepas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa terkait produk perbankan syariah, agar suatu produk yang dikeluarkannya berlandaskan prinsip syariah. Salah satunya adalah



tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa akad *hiwālah* adalah sah dan diperbolehkan oleh syariah.

Jika dianalisa sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwālah* pada ketentuan umum poin a, yaitu “Bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang-hutangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan *hiwālah*, yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya”. Maksud dari kalimat tersebut adalah, nasabah yang awalnya memiliki program KPR di bank konvensional lalu kesulitan untuk membayar cicilannya, pada akhirnya memilih untuk men-*take over* ke bank syariah dengan tidak adanya bunga atau tambahan lainnya, sudah sesuai ketentuan yang diterapkan. Sedangkan yang terjadi pada praktiknya di Bank Maybank tidak demikian, dalam praktiknya menggunakan akad *Musyārahah Mutanaqīshah* membantu untuk pengalihan hutang secara meringankan beban nasabah pada bank konvensional akan tetapi ada tambahan lain atau biasanya langsung disarankan ke dalam program *take over top up*.

Dari segi kekuatan hukum, fatwa adalah sebagai jawaban hukum yang memang tidak bersifat mengikat. Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Orang yang meminta fatwa, baik

perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan Pengadilan. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi menjadi keputusan Pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam menyikapi hal tersebut, meskipun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor :12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwālah* itu juga merupakan fatwa dan kekuatan hukumnya masih belum mengikat, dan untuk kesimpulan hasil penelitian ini, penulis tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwālah*, karena dalam hal ini ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwālah* bisa dikuatkan dengan pendapat dari para pakar fikih kontemporer dalam kitab-kitabnya.

Dan begitupun menurut hukum Islam pun diperbolehkan dengan adanya *Take Over* sudah ditetapkan dalam hadis dan ayat Al-Quran. Dikarenakan memiliki fungsi yaitu saling tolong-menolong sesama umat manusia. Dan harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dilihat dari pemaparan diatas, kasus tersebut seharusnya diterapkan dengan akad *hiwālah*. Dari fenomena pengalihan hutang, terdapat berbagai akad yang ada dalam fatwa DSN MUI, semua itu harus





menandatangani akad *Musyārahah Mutanaqīshah* serta melakukan pembayaran angsuran secara cicilan kepada bank Maybank Surabaya.

2. Dalam praktiknya pada akad pembiayaan (*take over*) rumah syariah iB MMQ yang diterapkan di bank Maybank Surabaya yang menggunakan akad *Musyārahah Mutanaqīshah* menurut hukum Islam bahwa cocok apabila diterapkan dalam produk pembiayaan KPR. Dengan mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi para *syarik* (bank dan nasabah). Akad *Musyārahah Mutanaqīshah* pada produk pembiayaan KPR rumah syariah iB MMQ sudah sesuai dengan fiqh dan fatwa. Dilihat dari segi fiqh penggunaan akad *Musyārahah Mutanaqīshah* pada produk pembiayaan KPR iB MMQ secara rukun sudah terpenuhi, akan tetapi secara praktik di lapangannya belum terpenuhi.





- Mingka Agustianto. *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan “Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah”*. Jakarta: Iqtishad Publishing. 2014.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mustofa Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Rahmat H Firdaus dan Maya Arianti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta. 2004.
- Rahman Abdul Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia. 2010.
- Salma Yeni Barlinti. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI). 2010.
- Sarosa Sumiaji, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Susyanti Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua. 2016.
- Sumar’in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Sihombing Damos. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Usman Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung : Citra Aditya. 2009.
- Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wangsawidjaja A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Warman Adi Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Zuhri Muh. *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.



